

# **ANALISIS PENGARUH SENSITIVITAS POLITIK TERHADAP BIAYA POLITIK**

**(Studi Empiris pada Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia)**



## **SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

**IKA PRATIWI**

**NIM. 12030111120013**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Ika Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120013

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH SENSITIVITAS  
POLITIK TERHADAP BIAYA POLITIK  
(Studi Empiris pada Penyedia Barang/Jasa  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Dosen Pembimbing : Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 17 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 197909242008122003

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Ika Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120013

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH SENSITIVITAS  
POLITIK TERHADAP BIAYA POLITIK  
(Studi Empiris pada Penyedia Barang/Jasa  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 Maret 2015**

Tim Penguji :

1. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)
3. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ika Pratiwi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Sensitivitas Politik Terhadap Biaya Politik (Studi Empiris pada Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Ika Pratiwi

NIM. 12030111120013

## **ABSTRACT**

*The aim of this research is to examine the influence of political sensitivity that is reviewed with the high visibility and the importance of contracts to the firm. Firm size, profitability, leverage, capital intensity, inventory intensity used as control variable.*

*The population in this study consists of all listed firms in Indonesia Stock Exchange in year 2013. Sampling method used is purposive sampling. Company criteria used is listed company in BEI 2013 for all industrial sectors except the agriculture sector and the financial sector. A company that only sampled must have a government contract in 2013 and value of the income before tax was positive in 2013. Total data of this study is 90 data. Simple regression used to be analysis technique.*

*The empirical result shows that political sensitivity review by the high visibility have positively significant influenced on political cost. While the political sensitivity that is reviewed by the importance of the contract have no significant results.*

**Keyword** : *political costs, providers of goods and services, sensitivity, contracts, taxes.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari sensitivitas politik yang ditinjau dengan visibilitas tinggi dan pentingnya kontrak terhadap biaya politik. Penelitian ini menggunakan lima variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, ukuran profitabilitas, *leverage*, intensitas modal dan intensitas persediaan.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 untuk seluruh sektor industri kecuali sektor pertanian dan sektor keuangan. Perusahaan yang dijadikan sampel harus memiliki kontrak dari pemerintah tahun 2013 dan nilai laba sebelum pajak yang positif pada tahun 2013 sehingga jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 90 data. Setelah melalui tahap pengolahan data, tidak terdapat data *outlier* yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sensitivitas politik yang ditinjau dengan visibilitas tinggi berpengaruh positif secara signifikan terhadap biaya politik. Sedangkan sensitivitas politik yang ditinjau dengan pentingnya kontrak tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

**Kata kunci** : biaya politik, penyedia barang/jasa, sensitivitas, kontrak, pajak

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

*Setiap langkah pastilah akan mudah jika setiap upaya yang dilakukan dilandasi dengan niat.*

*Tidak ada yang tidak mungkin untuk dicita jika kita berusaha karena akan ada selalu restu dari orang tua dan semangat membara untuk mereka.*

*Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap. (Q.S. al –Insyirah 5-8)*

### **PERSEMBAHAN**

***Skripsi ini saya persembahkan untuk:***

1. Ayah, Mama dan Adikku tercinta
2. Sahabat dan teman – teman ku sayang
3. Keluarga besar Akuntansi 2011

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan motivasi, arahan, nasihat, dan masukan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Semua dosen dan staf tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Orang tua tercinta, Ayah Warsito dan Mama Irawati serta Adikku-Dewi, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

6. Rizal Devangga Phalevi yang selalu membantu dan memotivasi selama proses pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Sahabat-Sahabatku, Rara, Fella, Rendi, Pipin, Silfi, Mbak Dini, Uli, Chici, Fiana, Erska, Wenni, Alisyah dan seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2011. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
8. Terimakasih untuk Mbak Arum, Mbak Narti, Nisa, Mbak Widi, Widya, Himas, Shofwa, Indri, dan semua adik-adik kos Omah Ijoe yang telah memberikan semangat dan perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh kerabat, teman, dan pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 17 Maret 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
1.4 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	17
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	18
2.1.1 Hipotesis Biaya politik.....	18
2.1.2 Biaya Politik.....	20
2.1.3 Sensitivitas Politik.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu. ....	20
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis. ....	25

2.4 Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	33
3.1.1 Variabel Dependen .....	33
3.1.2 Variabel Independen.....	34
3.1.3 Variabel Kontrol.....	35
3.1.4 Definisi Operasional.....	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	38
3.2.1 Populasi .....	38
3.2.2 Sampel .....	38
3.3 Jenis dan Sumber data .....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.5 Metode Analisis.....	40
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	41
3.5.3 Regresi Sederhana ( <i>Simple Regression</i> ) .....	42
3.5.4 Uji Hipotesis .....	43
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	43
3.5.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>	<b>45</b>
4.1 Deskripsi dan Objek Penelitian .....	45
4.2 Analisis Data .....	46
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	46
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	51
4.2.3 Uji Hipotesis .....	55
4.2.3.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) .....	55

4.2.3.2 Analisis Korelasi (R).....	59
4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	60
4.3 Interpretasi Hasil.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Keterbatasan .....	67
5.3 Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	71

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Definsi Operasional.....	37
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	45
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik Visibilitas Tinggi .....	46
Tabel 4.3 Deskriptif Statistik Pentingnya Kontrak .....	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Normalitas Uji Kolmogrov Smirnov (K-S).....	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Normalitas Uji Kolmogrov Smirnov (K-S).....	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Parsial ( T–test) .....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Parsial ( T–test) .....	56
Tabel 4.8 Koefisien Korelasi (R) .....	59
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	27
Gambar 3.1 Definisi Operasional.....	37
Gambar 4.1 Normal Probability Plot Visibilitas Tinggi .....	51
Gambar 4.2 Histogram Normalitas Visibilitas Tinggi .....	52
Gambar 4.3 Normal Probability Plot Pentingnya Kontrak .....	52
Gambar 4.4 Histogram Normalitas Pentingnya Kontrak .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN .....	71
LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF .....	74
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS .....	75
LAMPIRAN D UJI REGRESI .....	78



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas beberapa bagian yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan skripsi. Latar belakang penelitian berfungsi sebagai informasi yang relevan untuk membantu perumusan pokok permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan dalam penelitian dapat berasal dari fenomena bisnis atau data lapangan, ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, serta dari perspektif teori yang digunakan sebagai landasan penelitian.

Latar belakang penelitian berisi penjabaran berbagai alasan yang menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian mengenai pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kemudian dirumuskan masalah-masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya diuraikan tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat dari penelitian bagi beberapa pihak. Bagian akhir dalam bab ini berisi sistematika penulisan skripsi secara rinci dari bab pertama hingga yang terakhir.

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menjalankan peranannya selalu berupaya menyediakan barang dan pelayanan yang baik untuk warga negaranya. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menyediakan infrastruktur yang meliputi kegiatan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat dikarenakan penyediaan infrastruktur yang baik dapat menunjang perekonomian negara (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2010). Oleh karena itu pemerintah membutuhkan kerjasama dengan badan usaha khususnya badan usaha swasta untuk menyediakan barang maupun jasa dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mampu memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan melalui Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Suparto, 2010). Sebelum memperoleh kontrak dari pemerintah, perusahaan-perusahaan tersebut harus mengikuti proses pelelangan (tender) dan bersaing dengan para perusahaan-perusahaan lainnya. Hanya perusahaan yang memenuhi persyaratan dari kualifikasi tender yang dapat memenangkan proyek-proyek yang dicanangkan oleh pemerintah. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” menyebutkan bahwa perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah dan bertindak sebagai pihak yang menyediakan layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa tersebut dikenal dengan sebutan Penyedia Barang/Jasa.

Atas transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan penyedia barang/jasa dengan pemerintah maka perusahaan akan terlibat dalam suatu proses politik

dimana proses politik dipandang sebagai sebuah persaingan dalam transfer kekayaan (Watt dan Zimmerman 1986 dalam Mills, *et al.*, 2012). Transfer antara perusahaan dan pemerintah dapat bersifat negatif (misalnya, membayar pajak) dan juga dapat bersifat positif (misalnya, menerima subsidi atau penerimaan dari pemerintah lainnya). Selama proses politik tersebut penyedia barang/jasa bagi pemerintah akan memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan transfer kekayaan positif atau mengurangi transfer kekayaan negatif. Oleh karena itu, penyedia barang/jasa akan patuh terhadap pengawasan dari pemerintah dan bersedia menanggung biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses politik tersebut diantaranya yaitu beban pajak. Biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang memilih metode akuntansi lebih konservatif untuk menghindari pengawasan atau mengurangi pengawasan dari pemerintah dikenal dengan sebutan "biaya politik" (Mills, *et al.*, 2010). Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya (Resmi, 2011). Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi

perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan biaya politik berupa beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan agar tidak memberatkan perusahaan (Adelina, 2012 dalam Darmawan dan Sukartha, 2014).

Dalam konteks pajak, biaya politik yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa berupa beban pajak akan dibayarkan sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dimaksudkan untuk menghindari pengawasan dari pemerintah yang apabila perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak maka pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut, dan jika dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa perusahaan telah melakukan kecurangan maupun ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka hal tersebut akan mengakibatkan pemerintah menghapus subsidi pajak atau kerugian lainnya seperti pembatalan kontrak dan pemberian sanksi pajak kepada perusahaan yang melanggar (Mills, *et al.*, 2012). Pengawasan dari pemerintah dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, SKK Migas, dan lembaga lainnya. Berdasarkan alasan tersebut maka perusahaan akan secara sukarela membayar pajak sesuai dengan besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan, hal tersebut dilakukan oleh perusahaan selaku penyedia barang/jasa bagi pemerintah dimaksudkan untuk menghindari pajak tambahan dan upaya untuk mempertahankan kontrak yang diperoleh dari

pemerintah serta tetap diperbolehkan untuk mengikuti proses tender periode berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis memilih sensitivitas politik yang ditinjau dari visibilitas tinggi dan pentingnya kontrak sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Sensitivitas politik dipilih karena perusahaan yang memiliki nilai kontrak yang cukup besar akan lebih mendapat pengawasan dari pemerintah maupun media dan apabila proporsi pendapatan yang diperoleh perusahaan cukup besar atas kontrak tersebut, maka perusahaan akan berusaha mempertahankan kontrak sehingga mendorong perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang menjadi kewajibannya yaitu diantaranya beban pajak agar tidak kehilangan pendapatan dari kontrak tersebut.

Perusahaan yang memiliki nilai kontrak yang besar juga akan menanggung biaya politik yang lebih besar. Mills, *et al.* (2012) berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara visibilitas kontrak dengan biaya politik. Seluruh perusahaan selaku penyedia barang/jasa bagi pemerintah akan diawasi oleh pemerintah. Penyedia barang/jasa yang memperoleh nilai kontrak yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya, dengan nilai kontrak yang besar tersebut maka perusahaan lebih mendapatkan pengawasan yang lebih dari pemerintah maupun media sosial (Watt dan Zimmerman 1986 dalam Mills, *et al.*, 2012). Watt dan Zimmerman (1986) memberikan bukti bahwa perusahaan-perusahaan besar khususnya di industri minyak dan gas, laporan tarif pajak efektif rata-rata lebih tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi biaya politik suatu perusahaan yaitu pentingnya kontrak pemerintah bagi perusahaan. Perusahaan yang bergantung pada kontrak-kontrak pemerintah menanggung resiko yang lebih tinggi karena sebagian besar proporsi pendapatan perusahaan diperoleh dari pendapatan atas kontrak pemerintah. Jika perusahaan kehilangan pendapatan dari kontrak karena adanya pembatalan kontrak, hal ini akan mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan dan akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan bersedia mengeluarkan biaya politik yang merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan agar perusahaan tidak kehilangan pendapatan yang berasal dari kontrak dengan pemerintah.

Ukuran perusahaan (*Size*), Profitabilitas (ROA), *leverage*, intensitas modal, intensitas persediaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini yang berfungsi untuk mengendalikan agar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

*Size* (Ukuran Perusahaan) merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan pada penelitian ini adalah berdasarkan pada total aktiva perusahaan. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil dan memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan yang besar juga

lebih besar sesuai dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Akan tetapi perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar meskipun memiliki biaya politik lebih besar. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Oleh karena itu perusahaan lebih mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang kredibel (Muliati, Ni Ketut. 2011). Hal ini menjadikan perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan besarnya tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan.

*Return on assets (ROA)* merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan atau dengan kata lain, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi

berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain.

*Leverage* atau *Deb to Equity Ratio* merupakan perbandingan antara seluruh hutang perusahaan baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan, *leverage* digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan atau dapat dikatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012 dalam Darmawan dan Sukartha, 2014).

Intensitas modal diukur dengan menggunakan rasio total aset tidak lancar terhadap total asset. Suatu perusahaan yang padat modal dapat memiliki beban pajak yang lebih rendah dari ketentuan pajak yang seharusnya dikenakan kepada perusahaan hal tersebut dikarenakan perusahaan yang padat modal dengan berbagai teknologi yang dimiliki dituntut untuk bekerja lebih produktif berdasarkan aset tetap yang dimiliki sehingga memungkinkan bagi perusahaan untuk meminta keringanan pajak kepada pemerintah. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan maka beban depresiasi perusahaan juga semakin besar, sehingga beban depresiasi tersebut dapat mengurangi laba yang akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh.

Intensitas persediaan diukur dengan menggunakan rasio persediaan terhadap total aset, perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi memiliki harga pokok penjualan (HPP) yang tinggi, hal ini dapat mengurangi laba perusahaan sehingga berdampak pada rendahnya beban pajak yang dikenakan atas laba tersebut.

Terdapat berbagai penelitian empiris yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya politik perusahaan yang umumnya menggunakan ukuran perusahaan untuk mengukur sensitivitas politik suatu perusahaan. Penelitian-penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengaruh visibilitas kontrak perusahaan (nilai kontrak yang diperoleh perusahaan dari pemerintah) terhadap biaya politik (Mills, *et al.*,2012), sementara pada dekade terakhir ini penelitian yang dilakukan juga mempertimbangkan faktor bagaimana pentingnya kontrak bagi perusahaan dapat mempengaruhi biaya politik yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa bagi pemerintah.

Dalam satu dekade terakhir, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik. Berdasarkan pada teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik, perusahaan akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang lebih konservatif sehingga perusahaan tidak menarik perhatian dari pemerintah yang akan mengawasi perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dalam industri (Mills, *et al.*,2012). Jika dikaitkan dengan biaya politik, perusahaan secara sukarela membayar pajak sesuai dengan ketentuan biaya pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan dan melaporkannya dalam laporan keuangan untuk

menghindari pengawasan berlebih dari pemerintah dan mengurangi pengawasan dari pemerintah yang dapat mengakibatkan adanya pajak tambahan yang dikenakan kepada perusahaan maupun tindakan lain pemerintah melalui peraturan yang ada yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan apabila ditemukan dari hasil pemeriksaan bahwa perusahaan tidak mengeluarkan biaya politiknya.

Sensitivitas politik penyedia barang/jasa muncul dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak pemerintah, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada kontrak pemerintah akan mengeluarkan biaya politik yaitu biaya yang terkait pajak untuk mempertahankan pendapatan yang diperoleh dari kontrak pemerintah (Mills, *et al.*, 2012). Sensitivitas politik adalah pengaruh gabungan karena perusahaan memiliki nilai kontrak dari pemerintah yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan sehingga mampu memotivasi perubahan perilaku. Dalam penelitian Mills *et al.*, (2012), indikator untuk mengukur sensitivitas politik yaitu: (1) Visibilitas tinggi (besarnya nilai kontrak yang dimiliki perusahaan dibandingkan perusahaan lain, dalam jutaan rupiah), dan (2) Pentingnya kontrak pemerintah (persentase pendapatan perusahaan yang berasal dari kontrak pemerintah). Dalam penelitian ini diperkirakan bahwa penyedia barang/jasa menanggung biaya politik terkait dengan pajak yaitu membayar pajak yang lebih besar sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh karena meningkatnya sensitivitas politik perusahaan.

Penelitian Mills, *et al.* (2012) menyatakan bahwa hasil penelitian yang lemah ketika hanya menggunakan ukuran visibilitas kontrak atau hanya pentingnya kontrak pemerintah bagi penyedia barang/jasa untuk mengukur

sensitivitas politik, sehingga penelitian tersebut membangun ukuran gabungan baru untuk variabel sensitivitas politik yaitu dengan menggabungkan ukuran kontrak dan pentingnya pendapatan bagi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data perusahaan penyedia barang/jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kontrak dengan pemerintah. Penelitian ini menganalisis pengaruh sensitivitas politik penyedia barang/jasa pemerintah terhadap biaya politik. Penelitian ini menggunakan pembayaran pajak penyedia barang/jasa kepada pemerintah untuk mengukur biaya politik. Pembayaran pajak pemerintah tidak dapat diamati secara terbuka, maka digunakan tarif pajak efektif yang berlaku bagi penyedia barang/jasa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mills, *et al.* (2012) yang menganalisis pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik penyedia barang/jasa pemerintah dengan sampel perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode pengamatan, variabel, dan jumlah sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana variabel independen dan dependen pada penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan selama tiga tahun sedangkan periode pengamatan dalam penelitian ini didasarkan hanya pada data satu tahun yaitu tahun 2013, hal ini dikarenakan dari seluruh sampel yang diteliti tidak seluruh sampel menyediakan data berupa laporan keuangan yang dibutuhkan untuk dilakukan penelitian selama tiga tahun. Penelitian ini juga tidak menggunakan seluruh variabel yang diteliti pada penelitian Mills, *et al* yaitu untuk variabel daya tawar, iklan dan R&D disebabkan oleh adanya keterbatasan

data yang tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mereplikasi tetapi dengan melakukan reduksi dari penelitian sebelumnya.

Penyedia barang/jasa yang memperoleh nilai kontrak yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya (visibilitas tinggi), dengan memiliki ukuran kontrak yang besar akan menjadikan perusahaan lebih mendapatkan pengawasan yang lebih dari pemerintah maupun media sosial serta apabila perusahaan sangat bergantung pada kontrak-kontrak pemerintah karena sebagian besar proporsi pendapatan perusahaan diperoleh dari pendapatan kontrak pemerintah (pentingnya kontrak), dua hal tersebut akan mendorong penyedia barang/jasa untuk menanggung biaya politik yaitu membayar pajak yang besar sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh berdasarkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan tanpa melakukan penghindaran pajak karena sensitivitas politik perusahaan meningkat.

Berdasarkan penelitian Mills, *et al* (2012) yang menganalisis pengaruh dari sensitivitas politik terhadap biaya politik, maka dinilai perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik berupa beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dengan melihat pengaruh dari sensitivitas politik terhadap biaya politik suatu perusahaan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pengawasan politik dari pemerintah maupun media terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penyedia barang/jasa yang terikat kontrak dengan pemerintah akan menjadikan perusahaan tersebut mendapat pengawasan yang lebih dari pemerintah. Segala tindakan perusahaan akan diawasi oleh pemerintah dan berbagai media dikarenakan kontrak dari pemerintah tersebut ditujukan untuk memenuhi kepentingan negara dan masyarakat pada umumnya.

Hipotesis biaya politik yang dikembangkan oleh Watt dan Zimmerman (1978) menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang lebih konservatif sehingga perusahaan tidak menarik perhatian para pemerintah yang akan mengawasi perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dalam industri (Mills, *et al.*, 2012). Perusahaan secara sukarela membayar pajak sesuai dengan ketentuan biaya pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan dan melaporkannya dalam laporan keuangan untuk menghindari pengawasan berlebih dari pemerintah dan mengurangi pengawasan dari pemerintah yang dapat mengakibatkan adanya pajak tambahan yang dikenakan kepada perusahaan maupun tindakan lain pemerintah melalui peraturan yang ada yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan apabila perusahaan tidak mengeluarkan biaya politiknya.

Penyedia barang/jasa bagi pemerintah terutama yang memiliki nilai kontrak cukup besar dari pemerintah termotivasi perilakunya untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, perilaku perusahaan tersebut merupakan respon akuntansi perusahaan dengan adanya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk pelaporan keuangan dalam hal ini

pelaporan mengenai kewajiban perpajakannya. Pentingnya kontrak dari pemerintah dalam hal ini cukup tingginya proporsi pendapatan yang diterima penyedia barang/jasa dari kontrak pemerintah dibandingkan seluruh pendapatan yang diterimanya menjadikan perusahaan akan mengeluarkan biaya politik yaitu biaya pajak yang dibayarkan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif adanya pengawasan lebih dari pemerintah dan untuk mempertahankan pendapatan dari kontrak dengan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

Apakah sensitivitas politik berpengaruh terhadap biaya politik?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh dari pengawasan politik pada pelaporan pajak perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih

mendalam dengan objek dan lingkup penelitian yang berbeda, sehingga dapat membantu memajukan ilmu yang diteliti.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Sehingga urutan pokok-pokok pikiran yang ada dalam bab-bab dan sub bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka berisikan teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih yang dijadikan landasan dalam penulisan ini. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, hubungan logis antar variabel dan perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji kualitas data, dan metode analisis data.

**BAB 4 : INTEPRETASI HASIL**

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai deskripsi objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan interpretasi data hasil penelitian yang telah dilakukan

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab telaah pustaka akan dibahas mengenai teori dan konsep yang menjadi landasan penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Selain itu, akan dijelaskan pula kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bentuk skema untuk memperjelas maksud penelitian, dan pengembangan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori pendukung serta penelitian sebelumnya.

Pada bagian pertama, dijelaskan bahwa teori yang menjadi dasar dari penelitian dan mendukung perumusan hipotesis adalah hipotesis biaya politik, kemudian dijelaskan pula berbagai konsep yang terkait dengan variabel penelitian. Penelitian terdahulu berisi uraian mengenai penelitian-penelitian dengan tema serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini juga dijelaskan objek yang menjadi penelitian, alat analisis yang digunakan, variabel-variabel dalam penelitian, serta hasil penelitian yang telah dilakukan. Kerangka pemikiran dibuat dengan tujuan untuk membantu pembaca dalam memahami hubungan antar variabel dan alur logika yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian terakhir dalam bab ini berisi pengembangan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis merupakan pernyataan yang dirumuskan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu.

## **2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Dalam sub-bab ini dibahas mengenai teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif menjelaskan pilihan akuntansi yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghindari munculnya berbagai konflik yang diakibatkan perbedaan kepentingan di antara pihak.

### **2.1.1. Hipotesis biaya politik**

Teori ini dikembangkan oleh Watt dan Zimmerman (1978), Watts dan Zimmerman (1978) dengan memperkenalkan paradigma Teori Akuntansi Positif. Teori Akuntansi Positif memandang perusahaan sebagai "*nexus of contract*" dengan biaya kontrak yang lebih besar daripada nol. Dalam pandangan "*nexus of contract*", perusahaan dianggap merupakan kumpulan perjanjian atau kontrak antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, pegawai, pemilik modal, pemasok, pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Dari sinilah kemudian muncul berbagai konflik yang diakibatkan perbedaan kepentingan di antara pihak.

Teori Akuntansi Positif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "Hipotesis Biaya Politik". Hipotesis biaya politik muncul akibat timbulnya fenomena bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan pangsa pasar dan laba yang sangat besar akan mendapat perhatian publik yang besar pula. Perusahaan seperti ini biasanya dituntut memenuhi standar kinerja operasi dan kinerja lingkungan yang tinggi. Perusahaan seperti ini rentan terhadap kenaikan pajak dan pungutan lain (Ghofar, 2003)

Relevansinya dengan penelitian ini yaitu perusahaan yang memiliki nilai kontrak yang besar mempunyai keuntungan yang besar, hal itu harus sebanding dengan timbal baliknya terhadap publik agar tidak menjadi sumber perhatian ataupun mendapat protes dari publik maupun pemerintah atas keuntungan yang diperoleh perusahaan (Fajarini SW, 2009). Perusahaan yang memiliki nilai kontrak yang besar akan lebih diawasi oleh pemerintah maupun media baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dari pemerintah dilakukan oleh SKK Migas, KPPU dan lembaga lainnya. Pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu saat awal akan terjadinya biaya (*pre audit*); saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan (*current audit*); dan terakhir, setelah biaya terjadi dan pekerjaan selesai dilakukan (*post audit*). Pengawasan dari pemerintah maupun media yang paling intens diarahkan kepada penyedia barang/jasa dengan kontrak yang lebih besar (Mills *et al.*, 2012). Adanya pengawasan tersebut sangat mempengaruhi perilaku penyedia barang/jasa. Perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar dari pemerintah atas proyek yang dimenangkan dari proses tender dan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam hal pengadaan barang dan jasa terkait dengan kepentingan publik, serta besarnya pendapatan yang berasal dari kontrak akan menjadikan perusahaan akan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak kehilangan kontrak dari pemerintah yang merupakan sumber pendapatannya. Hal tersebut mendorong sensitifitas perusahaan dalam pengeluaran biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu beban pajak oleh karena itu perusahaan bersedia menanggung biaya politik yang merupakan kewajibannya berupa pembayaran pajak yang lebih

besar sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dibanding perusahaan yang lain. Oleh karena itu perusahaan akan mengeluarkan biaya pajak yang lebih sebagai alokasi dari biaya politik perusahaan.

### **2.1.2 Biaya Politik**

Biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang memilih metode akuntansi lebih konservatif untuk menghindari pengawasan atau mengurangi pengawasan dikenal dengan sebutan biaya politik (Mills, *et al.*, 2010). Menurut Mills, *et al.* (2012) biaya politik adalah pembayaran pajak kepada pemerintah oleh penyedia barang/jasa yang didasarkan dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku. Hasil penelitian Mills, *et al.* (2012) menunjukkan bahwa tingginya sensitivitas politik mempengaruhi sebuah perusahaan penyedia barang/jasa untuk membayar pajak yang lebih besar dari perusahaan penyedia barang/jasa yang lain.

### **2.1.3. Sensitivitas Politik**

Mills, *et al.* (2012) berpendapat bahwa sensitivitas politik adalah sebagai pengaruh gabungan dari memiliki nilai kontrak dari pemerintah yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan untuk memotivasi perubahan perilaku. Sensitivitas politik ditinjau dengan dua tinjauan yaitu ditinjau dari visibilitas tinggi (Variabel dummy, 1 jika jumlah visibilitas kontrak (Nilai kontrak dari pemerintah, dalam jutaan rupiah)) masuk 10 % tertinggi dari visibilitas kontrak semua perusahaan tahun tersebut, dan 0 sebaliknya, dan ditinjau dari pentingnya kontrak (Rasio nilai kontrak dari pemerintah yang diperoleh perusahaan terhadap total pendapatan perusahaan).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam subbab ini dijelaskan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai sensitivitas politik dan biaya politik. Beberapa penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1978) dalam Mills, *et al.* (2012) melakukan penelitian mengenai hipotesis biaya politik pada pengaturan kontraktor pemerintah yang menguji apakah kontraktor menanggung biaya politik yang berkaitan dengan pajak untuk melindungi pendapatan kontrak. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan bagaimana peran pemerintah sebagai konsumen utama atas barang dan jasa. Perusahaan kontraktor yang tunduk pada pengawasan dari pemerintah sering mengambil tindakan untuk membelokkan atau mendahului tindakan potensial negatif yang berasal dari pemerintah yang dapat meningkatkan biaya politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan secara sukarela membayar pajak atau membuat pelaporan keuangan yang memilih menghindari penambahan pajak dan tindakan negatif dari pemerintah.

Zimmerman (1983) dalam Mills, *et al.* (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara ukuran, kuasa penuh pengawasan pemerintah dan tingkat pajak yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan terbesar terutama di industri minyak dan gas serta manufaktur dikenakan biaya politik yang berhubungan dengan pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain.

Mills, *et al.* (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara pengawasan politik yang diukur dengan ukuran kontrak dan pentingnya kontrak

terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas perusahaan dari pengawasan politik memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian serupa yang telah diteliti di Indonesia adalah penelitian Muliati, Ni Ketut (2011) dimana penelitian tersebut memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva, log total penjualan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar meskipun memiliki biaya politik lebih besar. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Oleh karena itu perusahaan lebih mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang kredibel (Muliati, Ni Ketut. 2011).

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Mills, *et al.* (2012) yang meneliti pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik. Sensitivitas politik sebagai variabel independen, daya tawar kontraktor sebagai variabel moderator, dan biaya politik sebagai variabel dependen. Sensitivitas politik adalah pengaruh gabungan karena perusahaan memiliki kontrak perusahaan yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan sehingga mampu memotivasi perubahan perilaku. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas politik berpengaruh positif dan

signifikan terhadap biaya politik, perusahaan penyedia barang/jasa yang memiliki sensitivitas politik yang tinggi akan mengeluarkan biaya politik yang lebih besar dibanding perusahaan lain.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Mills, *et al.*, (2012). Namun demikian, terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya, penelitian tersebut melakukan penelitian dengan memasukkan variabel moderator yaitu daya tawar kontraktor, R&D dan iklan. Akan tetapi, variabel daya tawar kontraktor, R&D, dan iklan tersebut dihilangkan dari penelitian ini dikarenakan terbatasnya ketersediaan data yang tersedia di Indonesia untuk mendukung dalam pengukuran variabel tersebut. Perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu perbedaan dari subjek penelitian, jumlah sampel, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari penyedia barang/jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kontrak dengan instansi pemerintah dengan menggunakan data tahun 2013.

**Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti dan Tahun</b>	<b>Periode Penelitian</b>	<b>Variabel dan Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Mills <i>et al.</i> (2012)	Periode Penelitian: 2012	Variabel dependen : biaya politik  Variabel independen : sensitivitas politik Variabel moderat : daya tawar kontraktor Teknik analisis data: Analisis Regresi Berganda	Perusahaan yang sensitif secara politis akan membayar pajak yang lebih tinggi, tetapi daya tawar perusahaan akan mengurangi biaya politik tersebut.

Watts dan Zimmerman (1978) dalam Mills, <i>et al.</i> (2012)	Periode Penelitian: 1978		Perusahaan kontraktor yang tunduk pada pengawasan dari pemerintah sering mengambil tindakan untuk membelokkan atau mendahului tindakan potensial negatif yang berasal dari pemerintah yang dapat meningkatkan biaya politik.
Zimmerman (1983) dalam Mills, <i>et al.</i> (2012)	Periode Penelitian: 1983	Variabel dependen : tingkat pajak yang efektif  Variabel independen: ukuran, dan kuasa penuh pengawasan pemerintah	Perusahaan-perusahaan terbesar terutama di industri minyak dan gas serta manufaktur dikenakan biaya politik yang berhubungan dengan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain
Muliati, Ni Ketut (2011)	Periode Penelitian: 2011	Variabel dependen : Manajemen laba  Variabel independen: Asimetri informasi, ukuran perusahaan  Teknik analisis data: Analisa Regresi Berganda	Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen Laba

Mills, <i>et al.</i> (2010)	Periode Penelitian : 2010	Variabel independen : pengawasan politik  Variabel dependen: penghindaran pajak  Variabel moderat : kekuatan politik  Teknik analisis data: Analisis Regresi Berganda	Pengawasan politik atas ukuran kontrak dan pentingnya kontrak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
--------------------------------	------------------------------	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Alur hubungan logis antar variabel penelitian akan dijelaskan dan digambarkan dalam sub-bab kerangka pemikiran ini. Gambar yang disajikan dapat membantu untuk memahami hubungan antar variabel serta mengetahui ekspektasi koefisien dari variabel independen.

Berdasarkan pada teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik mengasumsikan bahwa perusahaan akan cenderung untuk menggunakan berbagai metode akuntansi sehingga perusahaan tidak menarik perhatian pemerintah ataupun media yang akan mengawasi perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dalam industri yaitu dengan cara membayarkan biaya politik perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik berupa pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sensitivitas politik penyedia barang/jasa muncul dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak pemerintah, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada kontrak pemerintah akan

mengeluarkan biaya politik yaitu biaya yang terkait pajak untuk melindungi pendapatan yang berasal dari kontrak dalam hal ini yaitu mempertahankan kontrak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan agar tidak diberhentikan ataupun dialihkan kepada perusahaan lainnya (Mills, *et al.*, 2012).

Sensitivitas politik adalah pengaruh gabungan dari memiliki kontrak perusahaan yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan untuk memotivasi perubahan perilaku dalam mengeluarkan biaya politik berupa pembayaran pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak kepada pemerintah tidak dapat diamati secara terbuka, maka digunakan tarif pajak efektif yang berlaku bagi penyedia barang/jasa.

Sesuai dengan penelitian Mills, *et al.* (2012) yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini, penyedia barang/jasa terutama yang memiliki kontrak cukup besar dari pemerintah termotivasi perilakunya untuk mengeluarkan biaya pajak sesuai dengan kewajiban sebagaimana mestinya, perilaku penyedia barang/jasa tersebut merupakan respon akuntansi perusahaan dengan adanya pengawasan dari pemerintah perusahaan karena perusahaan yang memiliki nilai kontrak besar menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum/*general public*).

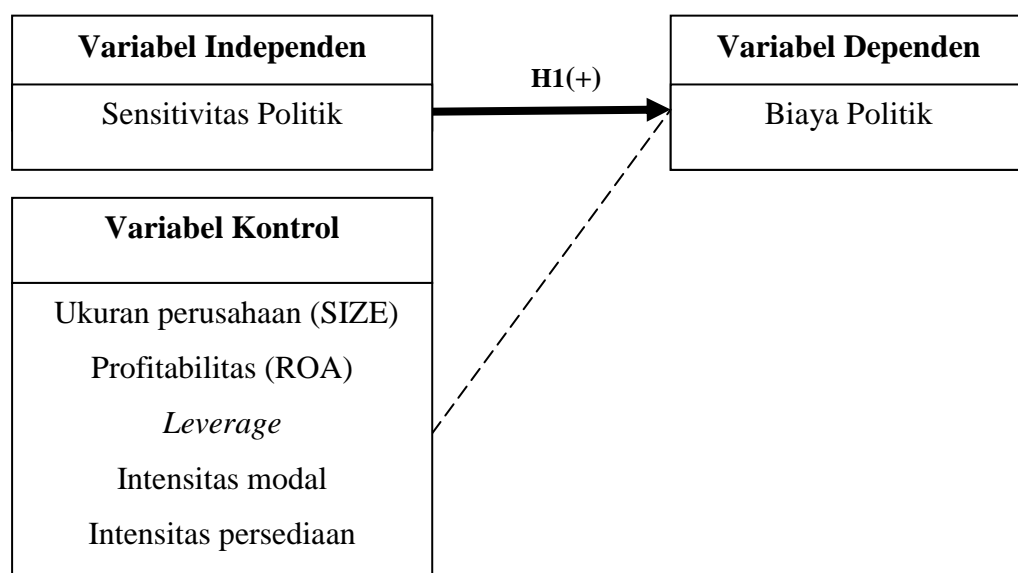
Pentingnya kontrak dari pemerintah dalam hal ini cukup tingginya proporsi pendapatan yang diterima perusahaan dari pemerintah dibanding seluruh pendapatan yang diterimanya menjadikan perusahaan akan mengeluarkan biaya politik yaitu biaya pajak yang lebih besar sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan sebagai bentuk kepatuhan atas kewajiban

perpajakannya kepada pemerintah. Dua hal tersebut akan mendorong perusahaan menjadi lebih sensitif terhadap pembayaran pajaknya.

Terdapat tiga jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Sensitivitas politik merupakan variabel independen yang mempengaruhi biaya politik sebagai variabel dependen. Ukuran perusahaan (*Size*), Profitabilitas (*ROA*), *leverage*, intensitas modal, intensitas persediaan merupakan variabel kontrol yang berfungsi untuk mengendalikan agar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber : Mills, *et al.* (2012)

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Sensitivitas Politik Terhadap Biaya Politik**

Berdasarkan pada teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik mengasumsikan bahwa perusahaan akan cenderung untuk menggunakan berbagai metode akuntansi sehingga perusahaan tidak menarik perhatian pemerintah ataupun media yang akan mengawasi perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dalam industri.

Transaksi bisnis yang dilakukan penyedia barang/jasa dengan pemerintah menjadikan penyedia barang/jasa akan terlibat dalam suatu proses politik dimana proses politik dipandang sebagai sebuah persaingan dalam transfer kekayaan (Watt dan Zimmerman 1986 dalam Mills, *et al.*, 2012). Transfer antara perusahaan dan pemerintah dapat bersifat negatif (misalnya, membayar pajak) dan juga dapat bersifat positif (misalnya, menerima subsidi atau penerimaan dari pemerintah lainnya). Selama proses politik tersebut penyedia barang/jasa akan memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah sebagai upaya dalam mendapatkan atau mempertahankan transfer kekayaan positif atau mengurangi transfer kekayaan negatif. Oleh karena itu, perusahaan akan patuh terhadap pengawasan dari pemerintah dan bersedia menanggung biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses politik tersebut diantaranya yaitu beban pajak (Mills *et al.*, 2010). Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi perusahaan

merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan biaya politik berupa beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan agar tidak memberatkan perusahaan (Adelina, 2012 dalam Darmawan dan Sukartha, 2014).

Biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang memilih metode akuntansi lebih konservatif untuk menghindari pengawasan atau mengurangi pengawasan dikenal dengan sebutan "biaya politik". Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Menurut Mills, *et al.* (2012) definisi biaya politik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembayaran pajak kepada pemerintah yang didasarkan dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku. Jika dikaitkan dengan biaya politik, perusahaan yang memiliki nilai kontrak besar menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum/*general public*) sehingga perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan besaran yang dikenakan untuk menghindari pengawasan berlebih dari pemerintah atau mengurangi pengawasan dari pemerintah yang dapat mengakibatkan adanya pajak tambahan yang dikenakan kepada perusahaan maupun tindakan lain pemerintah melalui peraturan yang ada yang dapat berdampak negatif bagi

perusahaan terutama penghentian kontrak apabila perusahaan tidak mengeluarkan biaya politiknya.

Besarnya proporsi pendapatan yang diperoleh dari kontrak pemerintah dibandingkan dengan seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan membuat pendapatan kontrak dari pemerintah tersebut menjadi sangat penting bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian Mills, *et al* (2012), suatu pendapatan dari kontrak pemerintah dapat dikatakan penting apabila persentase pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kontrak pemerintah dibandingkan dengan seluruh pendapatan yang diperoleh sebesar lebih dari 15 % (persen). Perusahaan penyedia barang/jasa akan berusaha mempertahankan kontrak tersebut dikarenakan apabila perusahaan kehilangan pendapatan dari kontrak pemerintah karena adanya pembatalan kontrak yang disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya yaitu salah satunya pembayaran pajak, pembatalan kontrak tersebut akan mengganggu keberlangsungan usaha dan sangat merugikan perusahaan karena perusahaan akan kehilangan sebagian besar pendapatannya. Oleh karena itu, perusahaan bersedia mengeluarkan biaya politik supaya perusahaan tidak kehilangan pendapatan yang berasal dari kontrak dengan pemerintah (Mills *et al.*, 2012).

Menurut penelitian Muliati, Ni Ketut (2011), ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar meskipun memiliki biaya politik lebih besar. Biaya politik

muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan lebih mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang kredibel.

Sensitivitas politik penyedia barang/jasa muncul dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dengan pihak pemerintah, kontraktor yang bergantung pada kontrak pemerintah akan mengeluarkan biaya politik yaitu beban pajak untuk mempertahankan pendapatan yang diperoleh dari kontrak pemerintah (Mills *et al.*, 2012). Sensitivitas politik adalah efek gabungan karena perusahaan memiliki kontrak perusahaan yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan sehingga mampu memotivasi perubahan perilaku.

Perilaku penyedia barang/jasa akan sangat dipengaruhi dengan adanya pengawasan baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan bisa berasal dari pemerintah maupun media yang menunjukkan pengawasan yang paling intens diarahkan kepada perusahaan penyedia barang/jasa dengan kontrak yang lebih besar (Mills *et al.*, 2012). Hal tersebut mendorong sensitivitas perusahaan dalam pengeluaran biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu beban pajak. Oleh karena itu perusahaan bersedia menanggung biaya politik yang merupakan kewajibannya berupa pembayaran pajak yang lebih besar sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dibanding perusahaan yang lain.

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang telah diuraikan, dan kerangka pemikiran teoritis dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H : Sensitivitas politik berpengaruh positif terhadap biaya politik

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Pada bab ini terdapat beberapa bagian yaitu variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Pada bagian pertama, akan dijelaskan mengenai definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, dijelaskan juga cara pengukuran variabel tersebut secara lebih operasional. Populasi dan sampel berisi uraian mengenai anggota populasi, kriteria dan jumlah sampel yang akan diambil, serta metode pengambilan sampel untuk penelitian. Jenis dan sumber data berisi pembahasan mengenai jenis data dari variabel dan sumber dari data penelitian. Jenis data variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Dalam bagian metode pengumpulan data dijelaskan metode pengambilan data penelitian yang digunakan. Metode pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumenter. Selanjutnya, di bagian akhir bab ini dibahas mengenai teknik analisis dan mekanisme penggunaannya, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi, alasan penggunaan alat analisis, serta pengujian asumsi dari teknik analisis tersebut.

### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biaya Politik pada penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI dan memiliki kontrak dengan pemerintah tahun 2013.

#### 2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sensitivitas Politik pada penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI dan memiliki kontrak dengan pemerintah tahun 2013.

#### 3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (*SIZE*), Profitabilitas (*ROA*), *Leverage*, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan pada penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI dan memiliki kontrak dengan pemerintah tahun 2013.

#### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya politik. Menurut Mills, et al. (2012) biaya politik didefinisikan sebagai pembayaran pajak kepada pemerintah yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa yang didasarkan dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mengetahui pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2013 dalam penelitian ini digunakan beban pajak kini (*current tax*) karena pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (*WP*) dalam tahun

berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiscal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. ED PSAK No. 46 (Revisi 2010) menjelaskan definisi pajak kini yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Beban pajak kini tersebut dibandingkan dengan laba sebelum pajak sehingga dapat diketahui berapa persentase biaya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada tahun berjalan yaitu tahun 2013.

Biaya politik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$biaya\ politik = \frac{beban\ pajak\ kini}{laba\ sebelum\ pajak}$$

Penelitian ini menggunakan rasio beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak tahun 2013 untuk mengukur biaya politik. Pengukuran ini berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Mills, *et al.* (2012).

### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sensitivitas politik. Variabel sensitivitas politik diukur dengan menggunakan dua tinjauan, yaitu sensitivitas politik yang ditinjau dari : (1) VisTing (visibilitas tinggi) merupakan variabel dummy, 1 jika visibilitas kontrak (nilai kontrak dari pemerintah yang diperoleh perusahaan, dalam jutaan rupiah) pada tahun 2013 masuk 10 % tertinggi dari visibilitas kontrak semua perusahaan tahun tersebut, dan 0 untuk sebaliknya. (2) PenKon (pentingnya kontrak), diukur menggunakan rasio nilai kontrak dari

pemerintah yang diperoleh perusahaan (dalam jutaan rupiah) terhadap total pendapatan perusahaan).

Menurut Mills, *et al.* (2012), sensitivitas politik didefinisikan sebagai pengaruh gabungan dari memiliki nilai kontrak dari pemerintah yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan untuk memotivasi perubahan perilaku.

Motivasi perubahan perilaku dalam membayar pajak tersebut dikarenakan pengawasan dari pemerintah maupun media yang paling intens diarahkan kepada penyedia barang/jasa dengan kontrak yang lebih besar (Mills, *et al.*, 2012). Oleh karena itu perusahaan akan dikenakan biaya politik yang lebih tinggi dan penyedia barang/jasa juga bersedia menanggung biaya politik berupa kewajiban pajak yang lebih besar dibanding perusahaan yang lain karena perusahaan mencoba untuk mengurangi pengawasan dari pemerintah. Apabila perusahaan memiliki nilai kontrak pemerintah yang sangat penting bagi perusahaan untuk dipertahankan maka perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang semestinya. Oleh karena semakin tinggi sensitivitas politik perusahaan maka akan berpengaruh positif terhadap biaya politik yang dikeluarkan oleh perusahaan.

### **3.1.3 Variabel Kontrol**

Variabel kontrol yang terdapat dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*SIZE*), profitabilitas (*ROA*), *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva, log total penjualan kapitalisasi pasar. Ukuran

perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aset perusahaan pada neraca akhir tahun, yang diukur dengan logaritma natural dari total aset, dilambangkan dengan SIZE.

Profitabilitas perusahaan didefinisikan sebagai ukuran seberapa besar laba yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan, dilambangkan dengan simbol ROA.

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}}$$

*Leverage* merupakan perbandingan antara seluruh hutang perusahaan, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan, *leverage* digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan atau dapat dikatakan merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya, dilambangkan dengan simbol LEV. *Leverage* diukur dengan menggunakan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang diformulasikan dalam rumus :

$$LEV = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total ekuitas}}$$

Intensitas modal diukur dengan menggunakan rasio total aset tidak lancar terhadap total aset, dilambangkan dengan simbol IntMod yang diformulasikan sebagai berikut :

$$IntMod = \frac{\text{Total aset tidak lancar}}{\text{total aset}}$$

Intensitas persediaan diukur dengan menggunakan rasio persediaan terhadap total aset, dilambangkan dengan simbol IntPersed yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{IntPersed} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{total aset}}$$

### 3.1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Pengertian	Indikator
Biaya politik (y)	Pembayaran pajak kepada pemerintah yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa yang didasarkan dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku Sumber : Mills, <i>et al.</i> (2012)	Rasio beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak Sumber : Mills, <i>et al.</i> (2012)
Sensitivitas politik (x)	Efek gabungan dari memiliki nilai kontrak dari pemerintah yang cukup besar untuk menarik pengawasan pemerintah dan cukup penting bagi perusahaan	1. Visibilitas tinggi (variabel dummy, 1 jika visibilitas kontrak (nilai kontrak dari pemerintah yang diperoleh perusahaan, dalam jutaan rupiah) masuk 10 % tertinggi dari visibilitas kontrak semua perusahaan tahun tersebut, dan 0 sebaliknya.

	untuk memotivasi perubahan perilaku Sumber : Mills, <i>et al.</i> (2012)	2. Pentingnya kontrak (rasio nilai kontrak dari pemerintah yang diperoleh perusahaan terhadap total pendapatan perusahaan). Sumber : Mills, <i>et al.</i> (2012)
--	---	---

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang tidak seluruhnya diobservasi tetapi merupakan objek penelitian. Selain itu, populasi juga merupakan keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan penyedia barang/jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013.

### 3.2.2 Sampel

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 perusahaan dengan data tahun 2013. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode *purposive sampling* adalah pemilihan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan penyedia barang/jasa yang terdaftar di BEI tahun 2013 untuk seluruh sektor industri kecuali sektor pertanian dan sektor keuangan.
2. Perusahaan yang memiliki kontrak dari pemerintah tahun 2013.

3. Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak yang positif tahun 2013.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 90 perusahaan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari website perusahaan maupun pihak ketiga seperti Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tersebut berupa laporan keuangan auditan yang telah dipublikasikan perusahaan. Data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu :

1. Situs website perusahaan,
2. <http://www.idx.co.id>.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui website perusahaan maupun website Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumenter. Data-data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan berdasarkan data empiris dan dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan, dalam hal ini laporan keuangan. Data dalam penelitian juga dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka. Landasan teori diperoleh dengan mengkaji berbagai literatur pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, serta sumber yang lain.

### **3.5 Metode Analisis**

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan metode analisis regresi linear sederhana. Sebelum analisis regresi digunakan, perlu dilakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran variabel secara umum, seperti rata-rata, persebaran data, standar deviasi, dan nilai tengah data. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum data dianalisis dengan menggunakan metode regresi.

#### **3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian secara umum. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data agar data mudah dipahami (Ghozali, 2011). Analisis deskriptif yang dilakukan atas data penelitian diantaranya adalah frekuensi, rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

#### **3.5.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu model penelitian agar dapat dioperasikan dengan menggunakan analisis regresi. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana karena variabel independen dalam penelitian ini terdiri hanya satu variabel maka uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji normalitas.

### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011).

#### **a. Analisis Grafik**

Salah satu cara yang digunakan untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun melihat grafik histogram saja dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## **b. Analisis Statistik**

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual kelihatan normal namun secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik melalui Kolmogorov-Smirnov test(K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

Ho = Data residual berdistribusi normal

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka Ho ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
2. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka Ho diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

### **3.5.3 Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2011). Analisis regresi linear sederhana ini digunakan sebagai metode analisis karena dapat mengukur tingkat pengaruh variabel sensitivitas politik terhadap biaya politik, serta sifat hubungan variabel apakah positif atau negatif terhadap biaya politik.

Mengingat penelitian ini menggunakan 1 variabel bebas, dan 1 variabel terikat, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1\ i,t} + \beta_k X_{k\ i,t} + e$$

Keterangan :

$Y_{i,t}$  = Biaya politik perusahaan i yang terjadi pada tahun t

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien arah regresi variabel sensitivitas politik

$X_{1,i,t}$  = Sensitivitas politik perusahaan i yang terjadi pada tahun t

$\beta_k$  = Koefisien arah regresi variabel kontrol

$X_{k,i,t}$  = Variabel kontrol perusahaan i yang terjadi pada tahun t

e = Standar error

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan terhadap satu model yang digunakan dalam penelitian yaitu untuk menguji pengaruh sensitivitas politik terhadap biaya politik. Beberapa langkah pengujian hipotesis yang akan dilakukan adalah uji nilai koefisien determinasi, dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

#### 3.5.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variasi variabel dependennya (Ghozali, 2011). Nilai  $R^2$  yang semakin tinggi menjelaskan bahwa variabel independen semakin baik kemampuannya dalam menjelaskan variabel dependen pada penelitian. Semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen pada penelitian. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R<sup>2</sup> harus berkisar 0 sampai 1
- b. Bila R<sup>2</sup> = 1 berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- c. Bila R<sup>2</sup> = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **3.5.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)**

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Uji statistik t dalam penelitian dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,5 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan dan penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi ( sig ) lebih besar dari 0,5 maka hipotesis ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi ( sig ) lebih kecil atau sama dengan 0,5 maka hipotesis tidak dapat ditolak.